

UKURAN PERUSAHAAN, DEWAN KOMISARIS DAN *ENVIRONMENTAL DISCLOSURE*

Bahtiar Effendi

Matana University

E-mail: bahtiar.effendi90@gmail.com

Abstract

The research at examining the influence of firm size, board of commissioners, such as board of commissioners size, proportion of independent commissioners, the commissioner president's educational background, and the number of commissary chamber meeting on the environmental disclosure in manufacture companies listed in Indonesian Stock Exchange.

The population of this research is all of public manufacture companies in the year 2008-2014 The samples of this research are 26 of public manufacture companies, which selected by purposive sampling method. This research data were collected from Indonesian Stock Exchange (IDX) from 2008 until 2014 and also from each company's website.

The research using multiple regression analysis as the research method and the result from this research show that is no influence between commissioners size, proportion of independent commissioners and the commissioner president's educational background with environmental disclosure, and the firm size and the number of commissary chamber meeting influence positive.

Keywords: *Firm Size, Board of Commissioners Size, Proportion of Independent Commissioners, The Commissioner President's Educational Background, The Number of Commissary Chamber Meeting, Environmental Disclosure.*

PENDAHULUAN

Penelitian ini ditujukan untuk menganalisis pengaruh ukuran perusahaan dan dewan komisaris terhadap *environmental disclosure* di perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI). Ukuran perusahaan diukur dari logaritma total asset perusahaan pada suatu periode tertentu (biasanya per tahun). Dewan komisaris direpresentasikan dengan ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris.

Environmental disclosure merupakan pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan (Sutatno *et.al.*, 2006). Brown dan Deegan (1998) mengatakan *environmental disclosure* penting untuk dilakukan karena melalui pengungkapan lingkungan hidup pada laporan tahunan perusahaan, masyarakat dapat memantau aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan dalam rangka memenuhi tanggungjawab sosialnya. dukungan dari masyarakat.

Permasalahan pencemaran lingkungan masih sering terjadi di

Indonesia, misalnya saja masalah PT. Power Steel Mandiri (PT. PSM) Tangerang yang mengoperasikan empat dari sepuluh tungku pembakaran baja yang belum mendapatkan izin Amdal dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Kabupaten Tangerang yang mencemari udara dengan bahan B3 yaitu Bahan Beracun dan Berbahaya (WALHI, 2015). Selanjutnya pada bulan April 2017, WALHI mencatat sekitar 30 pabrik yang berada dikawasan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, membuang limbah sembarangan ke aliran sungai Citepus selama lebih dari lima tahun yang lalu. Akibatnya, salah satu anak sungai citarum yang memiliki panjang sekitar 10 kilometer itu saat ini kondisinya memprihatinkan. Bahkan, kini karena tingginya pencemaran sungai di lokasi itu menimbulkan bau yang tidak sedap serta mengakibatkan polusi air dipemukiman warga dan mengakibatkan gatal-gatal. (WALHI, 2017).

Berdasarkan kasus di atas dengan mempertimbangkan peraturan UU yang berlaku yakni UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009 dan UU No. 25 Tahun 2007, pada kenyataannya fenomena yang terjadi adalah perusahaan-perusahaan di Indonesia masih memiliki perhatian yang rendah terhadap masalah tanggung jawab sosial terutama mengenai dampak lingkungan dari aktivitas industrinya. Hal ini dapat dilihat dari adanya perusahaan-perusahaan Indonesia yang mendapat sorotan negatif atas terbelenggalnya pengelolaan lingkungan, kerusakan lingkungan yang diakibatkan dan rendahnya minat perusahaan terhadap konversi lingkungan (Kurniawati, 2011).

Hasil penelitian Yingju dan Abeysekera (2014) menemukan bahwa *corporate characteristic* yang

diproksikan dengan *firm size*, *financial performance*, *industry* dan *overseas listing* berhubungan positif terhadap *environmental disclosure*. Serta berhubungan negatif antara *stakeholders power* yang diproksikan dengan *government power*, *shareholder power*, *creditor power* dan *auditor power* dengan *environmental disclosure*. Penelitian yang menguji keterkaitan antara *corporate governance* dengan *environmental disclosure* dilakukan oleh Yu Cong dan Martin Freedman (2011) dengan hasil terdapat hubungan positif antara *corporate governance* terhadap *environmental disclosure*. Selanjutnya penelitian yang menguji hubungan antara dewan komisaris terhadap *environmental disclosure* dilakukan oleh Uwuigbe *et.al.* (2011) dengan hasil terdapat korelasi negatif dengan tingkat signifikan 0,01 antara ukuran dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan diantara perusahaan yang dipilih dan terdapat korelasi positif dengan tingkat signifikan 0,01 antara komposisi dewan komisaris terhadap tingkat pengungkapan lingkungan perusahaan.

Penelitian di Indonesia juga sudah banyak dilakukan antara lain oleh Febrina dan Ign Agung (2011) dengan hasil ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan sosial dan lingkungan namun variabel *leverage*, profitabilitas, ukuran dewan komisaris, dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap kebijakan pengungkapan sosial dan lingkungan. Suhardjanto dan Miranti (2008) dengan hasil profitabilitas dan tipe industri berpengaruh terhadap *environmental disclosure* akan tetapi *size*, *leverage*, cakupan operasional perusahaan, proporsi dewan komisaris dan latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap

environmental disclosure. Permatasari (2009) dengan hasil proporsi dewan komisaris independen, latar belakang *culture* presiden komisaris, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *environmental disclosure*, sedangkan latar belakang pendidikan, jumlah rapat dewan komisaris, proporsi komite audit independen, jumlah rapat komite audit dan tipe industri tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Yingju Lu dan Abeysekera Indra (2014). Selanjutnya, peneliti akan melakukan penelitian dengan judul “*Ukuran Perusahaan, Dewan Komisaris dan Environmental Disclosure*”.

TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Agensi

Alasan penggunaan teori agensi dalam penelitian ini adalah *corporate governance* berkaitan dengan bagaimana para pemilik (*principal*) yakin bahwa manajer (*agen*) akan memberikan keuntungan bagi mereka, yakin bahwa manajer (*agen*) tidak akan melakukan kecurangan-kecurangan yang akan merugikan para pemegang saham (Michael dan Johnson, 2000). Dengan kata lain, penerapan *corporate governance* melalui peran dewan komisaris diharapkan dapat menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) dan asimetri informasi terkait dengan praktik *environmental disclosure*.

Teori Legitimasi

Alasan penggunaan teori legitimasi dalam penelitian ini adalah ditinjau dari karakteristik perusahaan yang lebih relevan adalah ukuran perusahaan, dimana semakin besar ukuran suatu perusahaan maka informasi lingkungan yang diungkapkanpun akan semakin

luas untuk menunjukkan legitimasi mereka kepada para pemangku kepentingan publik sebagai cara untuk memastikan operasi mereka berkesinambungan (Yingju Lu dan Abeysekera Indra (2014).

Pengembangan Hipotesis Keterkaitan Ukuran Perusahaan terhadap *Environmental Disclosure*

Pengembangan hipotesis pertama dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Yingju Lu & Abeysekera (2014) dengan dasar teori legitimasi yang ditinjau dari karakteristik perusahaan yang lebih relevan adalah ukuran perusahaan, dimana semakin besar ukuran suatu perusahaan maka informasi lingkungan yang diungkapkanpun akan semakin luas untuk menunjukkan legitimasi mereka kepada para pemangku kepentingan publik sebagai cara untuk memastikan operasi mereka berkesinambungan. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₁: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Keterkaitan Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Pengembangan hipotesis yang kedua mengacu pada penelitian Frendy *et.al.* (2011) dan Sun *et.al.* (2010) dengan dasar teori agensi. Teori ini menyatakan bahwa konflik kepentingan antara agen dan prinsipal dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dapat menyelaraskan berbagai kepentingan yang ada dalam perusahaan (Ibrahim, 2007 dalam Waryanto, 2010). Mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori ini dapat dilakukan dengan mekanisme *corporate governance* melalui peran dewan komisaris. Semakin banyak

jumlah dewan komisaris dalam suatu perusahaan maka diharapkan dapat menekan atau menurunkan biaya keagenan (*agency cost*) terkait dengan praktik *environmental disclosure*. Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₂: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Keterkaitan Proporsi Komisaris Independen terhadap *Environmental Disclosure*

Pengembangan hipotesis yang ketiga dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Lin liao, *et al* (2014), Uwuigbe *et.al.* (2011), Choiriyah (2010) dan Permatasari (2009) dengan dasar dewan komisaris independen merupakan alat untuk mengawasi perilaku manajemen untuk meningkatkan pengungkapan informasi lingkungan dalam laporan tahunan perusahaan (Rosenstein dan Wyatt, 1990). Berdasarkan uraian tersebut, maka dapat dikembangkan hipotesis:

H₃: Proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Keterkaitan Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Pengembangan hipotesis keempat dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) dan Choiriyah (2010). Dasarnya adalah dari sudut pandang teori agensi, latar belakang pendidikan presiden komisaris sangat penting dalam *mereduces* tingkat *asimetry information* antara management (*agent*) dan pemilik

(*principal*). Akan lebih baik jika seorang presiden komisaris memiliki latar belakang pendidikan bisnis dan ekonomi karena seorang presiden komisaris harus memiliki kemampuan untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis (Bray, Howard, dan Golan, 1995 dalam Kusumastuti dkk, 2007). Dari uraian di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

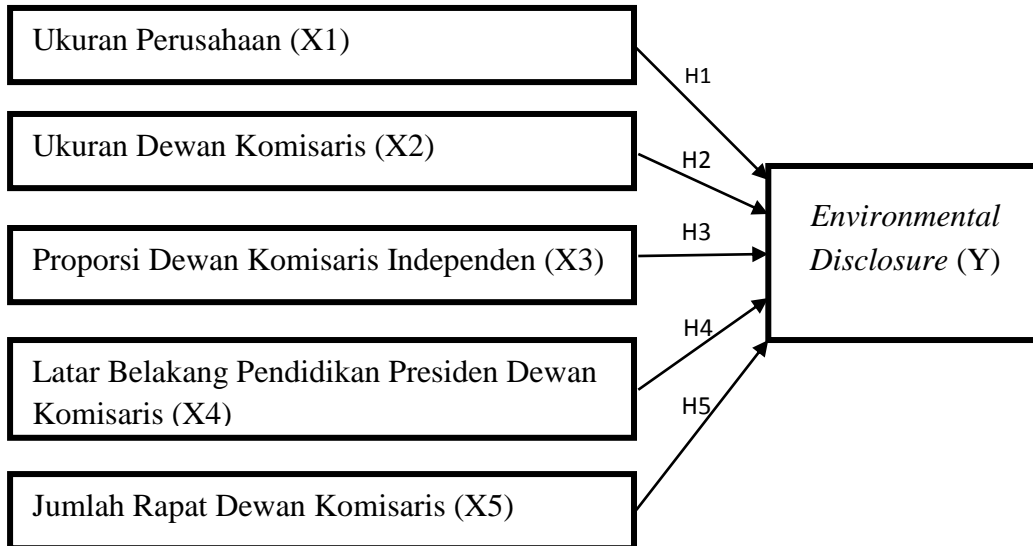
H₄: Latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*

Keterkaitan Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Pengembangan hipotesis kelima dalam penelitian ini mengacu pada penelitian Xie *et al.* (2003) dan Brick dan Chidambaran (2007). Dasarnya yakni dilihat dari perspektif teori agensi, semakin banyak intensitas jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris maka semakin banyak pula ruang dan kesempatan seorang management (*agent*) dan pemilik (*principal*) dalam mengkaji dan menganalisis apakah operasi perusahaan telah sesuai dengan kebijakan dan strategi perusahaan sehingga *asimetry information gap* dan konflik kepentingan (*agency cost*) dapat diminimalisir. Dari argumen tersebut di atas, maka dapat dikembangkan hipotesis sebagai berikut:

H₅: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Gambar 1
Kerangka Pemikiran



Sumber: Yingju Lu dan Abeysekera Indra (2014), Lin Liao *et.al* (2014), Yu Cong dan Martin Freedman (2011), Uwuigbe *et.al.* (2011), Pattern (1992)

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel independen dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan dan dewan komisaris yang direpresentasikan melalui ukuran dewan

komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan presiden komisaris, dan jumlah rapat dewan komisaris. Variabel dependennya adalah *environmental disclosure*. Definisi operasional dan pengukuran masing-masing variabel dijelaskan pada tabel 1.

Tabel 1
Operasionalisasi Variabel

Variabel	Konsep Variabel	Indikator	Skala
Ukuran Perusahaan (X ₁)	Ukuran perusahaan berdasarkan total aset yang dimiliki perusahaan. (Waryanto, 2010).	<i>log</i> (nilai buku total asset) (Haniffa dan Cooke, 2005)	Rasio
Ukuran Dewan Komisaris (X ₂)	Ukuran dewan komisaris dalam melakukan aktivitas monitoring dengan lebih baik (Akhtaruddin, <i>et.al</i> , 2009)	Jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu laporan tahunan perusahaan (Waryanto, 2010).	Rasio

Proporsi Dewan Komisaris Independen (X ₃)	Komisaris yang tidak berasal dari pihak terafiliasi yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen (Herwidayatmo, 2000)	$\frac{\sum \text{Komisaris Independen}}{\sum \text{Dewan Komisaris}}$ (Haniffa dan Cokke, 2005).	Rasio
Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris (X ₄)	Latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh presiden komisaris yang berpengaruh terhadap pengetahuan yang dimiliki (Ahmed dan Nicholls, 1994 dalam Akhtaruddin, 2009).	Kode 1 untuk latar belakang pendidikan keuangan atau bisnis; Kode 0 untuk latar belakang pendidikan lain. (Haniffa dan Cooke, 2005)	Nominal
Jumlah Rapat Dewan Komisaris (X ₅)	Rapat yang dilakukan antara dewan komisaris dalam suatu perusahaan (Yusnita, 2010)	Jumlah rapat dalam satu tahun. (Brick dan Chidambaran, 2007).	Rasio
<i>Environmental Disclosure</i> (Y)	Pengungkapan informasi yang berkaitan dengan lingkungan di dalam laporan tahunan perusahaan. (Fatayaningrum, 2011).	Skor pengungkapan lingkungan pada <i>annual report</i> dengan indeks GRI(Cooke, 1989)	Rasio

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah 146 perusahaan manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2008-2014 (IDX, 2017). Berdasarkan teknik *purposive sampling*, diperoleh sampel sebanyak 26 perusahaan manufaktur.

Alasan mengapa peneliti memilih perusahaan manufaktur adalah karena tingkat pengelolaan lingkungan pada periode tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini bisa dilihat hasil Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan (PROPER) periode tahun 2008/2009 yang menunjukkan bahwa

sektor industri manufaktur mempunyai jumlah peserta PROPER terbanyak yaitu 220 perusahaan dari 627 perusahaan. Pada periode penilaian ini terdapat 1 perusahaan sektor manufaktur dengan peringkat emas, sedangkan persentase perusahaan berdasarkan pada peringkat sebagai berikut hijau 6%, biru 34%, biru minus 42%, merah 8%, merah minus 8% dan hitam 4%. Dari persentase tersebut dapat disimpulkan bahwa dari 220 perusahaan manufaktur yang mengikuti PROPER, 180 perusahaan (81, 82%) sudah taat dalam aspek penataan pengendalian pencemaran air, udara dan pengelolaan limbah Berbahaya dan Beracun, sedangkan sisanya yaitu 40

perusahaan (18,18%) dikategorikan belum taat.

Selain itu, UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mewajibkan setiap perseroan yang berkaitan dengan dan/atau sumber daya alam melaksanakan kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Selanjutnya berdasarkan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan tanggungjawab sosial perusahaan (pasal 15 b). Selain itu berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mewajibkan setiap usaha dan atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup untuk memiliki Amdal (pasal 22 ayat 1). Maka, penelitian ini berargumen bahwa perusahaan manufaktur merupakan satu diantara perusahaan yang dimaksudkan dalam UU tersebut. Tidak semua anggota populasi ini akan menjadi

obyek penelitian sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel.

Metode Analisis Data

Uji hipotesis dilakukan dengan cara uji signifikansi (pengaruh nyata) variabel independen (X) terhadap variabel dependen (Y). Dalam penelitian ini digunakan analisis regresi linear berganda. Analisis regresi digunakan oleh peneliti apabila bermaksud meramalkan bagaimana keadaan (naik-turunnya) variabel dependen, dan apabila dua atau lebih variabel independen sebagai prediktor dimanipulasi atau dinaik turunkan nilainya. Untuk pengujian hipotesis yaitu dengan menggunakan analisis regresi berganda, berikut model regresi tersebut:

$$EDI_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 FSIZE_{it} + \alpha_2 UDKOM_{it} + \alpha_3 PRODKOM_{it} + \alpha_4 LBPPK_{it} + \alpha_5 JRPTDK_{it} + E_{it}$$

Keterangan Persamaan Regresi Berganda dijelaskan pada tabel 2 berikut ini:

Tabel 2
Persamaan Regresi Berganda dan Keterangan

Keterangan	
EDI	: <i>Environmental Disclosure Index</i>
α_0	: Konstanta
$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5$: Koefisien
FSIZE	: Ukuran Perusahaan
UDEKOM	: Ukuran Dewan Komisaris
PRODKOM	: Proporsi Dewan Komisaris Independen
LBPPK	: Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris
JRPTDK	: Jumlah Rapat Dewan Komisaris
E	: Standar error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa koefisien korelasi antar variabel bebas di atas 0,5 dan variabel FSIZE, UDKOM, JRPTDK signifikan sedangkan PRODKOM dan LBPPK tidak signifikan. Hasil uji

heteroskedastisitas menunjukkan bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y dalam grafik scatterplot. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas antar variabel dalam model regresi. Hasil uji autokolerasi menunjukkan bahwa nilai DW pada model regresi

sebesar 1,481, hal ini menunjukkan bahwa model regresi tidak terjadi autokolerasi, karena nilai DW berada diantara -2 sampai +2. Hasil uji *Goodness of Fit* model menunjukkan

bahwa model dinyatakan Fit sebagaimana dapat dilihat dari uji determinasi menunjukkan nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,135.

Tabel 3
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,398 ^a	,158	,135	,21961

a. Predictors: (Constant), JRPTDK, FSIZE, PRODKOM, LBPPK, UDKOM

b. Dependent Variable: EDI

Tabel 4
Hasil Analisis Regresi Berganda

Coefficients^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,078	,099	,790	,430
	FSIZE	,068	,023	,257	,004
	UDKOM	,006	,009	,062	,693
	PRODKOM	,038	,164	,016	,231
	LBPPK	,003	,038	,007	,927
	JRPTDK	,014	,004	,285	3,986

a. Dependent Variable: EDI

Sumber: Data sekunder yang diolah (2016)

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap *Environmental Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran perusahaan (FSIZE) yang merupakan representasi dari struktur perusahaan dalam penelitian ini dapat dibuktikan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* (EDI) pada β_1 sebesar 0,068 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 ($0,004 < 0,05$). Hal ini dapat

disimpulkan bahwa koefisien positif signifikan berarti semakin besar ukuran perusahaan akan semakin tinggi tingkat pengungkapan informasi lingkungan dalam *annual report*. Dalam kerangka teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar, sehingga untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih

luas. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Febrina (2011), Frendy (2011), Nan Sun *et.al.* (2010), dan Uwuigbe (2011), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian variabel ukuran dewan komisaris (UDKOM) terhadap tingkat *environmental disclosure* (EDI) diperoleh hasil bahwa nilai β_2 sebesar 0,006 dengan tingkat signifikan sebesar 0,489 berada lebih besar pada $\alpha = 0,05$, hal ini berarti ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Alasan mengapa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* karena berdasarkan ketentuan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diungkapkan bahwa dewan komisaris terdiri atas 1 (satu) orang anggota atau lebih yang berarti satu ketua dewan komisaris dan satu anggota dewan komisaris. Apabila dibandingkan dengan hasil data aktual penelitian, maka masih ada perusahaan dalam sampel yang memiliki jumlah dewan komisaris minimal yakni 2 orang (PT. Jaya Pari Steel, Tbk). Oleh karenanya, dengan ukuran dewan komisaris yang minimal tersebut menyebabkan praktik *environmental disclosure* pun tidak maksimal. Selain itu, ditemukan nilai standar deviasi yang cukup tinggi sebesar 2,427 itu artinya ukuran dewan komisaris dalam hal ini dewan komisaris tidak mempunyai kepentingan apapun terhadap *environmental disclosure*. Sehingga, berapapun jumlahnya dewan komisaris dalam suatu perusahaan tidak satupun dewan komisaris yang memperhatikan

terhadap pengelolaan lingkungan. Artinya, dari sekian banyaknya perusahaan yang ada disampel, tidak satupun dari mereka yang memfokuskan diri pada *environmental disclosure*. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji parsial (*t-test*), dimana ukuran dewan komisaris memiliki nilai koefisien β yang sangat kecil sebesar 0,006 dengan tingkat signifikansi 0,489 (lebih besar dari 0,05).

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Febrina *et.al.* (2011) dan Uwuigbe (2011), yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi *environmental disclosure*. Namun, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Frendy *et.al.* (2011) dan Sun *et.al.* (2010) yang menemukan adanya pengaruh yang signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan *environmental disclosure*.

Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap *Environmental Disclosure*

Dalam penelitian ini, proporsi dewan komisaris independen diukur dari perbandingan antara total komisaris independen dengan total dewan komisaris. Hasil penelitian menunjukkan nilai β_3 sebesar 0,038 dengan tingkat signifikan sebesar 0,818 berada lebih besar pada $\alpha = 0,05$, dengan demikian proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Suhardjanto dan Miranti (2008), Suhardjanto dan Afni (2009), Yusnita (2010), dan Fatayaningrum (2011), yang menyatakan bahwa tidak ada pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen dengan *environmental disclosure*. Dengan demikian,

keberadaan atau proporsi dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan dikarenakan mereka tidak mempunyai hubungan dengan aktivitas atau operasi sehari-hari perusahaan (Hasyim dan Devi, 2007). Akan tetapi, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Choiriyah (2010) dan Uwuigbe (2011) yang menyatakan bahwa proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Alasan yang digunakan untuk menjelaskan hal ini adalah berdasarkan data aktual dari perusahaan sampel dimana masih ditemukan proporsi dewan komisaris dibawah standar ketentuan yang berlaku yakni 0,2 (PT. Polychem Indonesia). Oleh karenanya, dengan minimnya peran independensi dewan komisaris menjadikan praktik *environmental disclosure* pun menjadi rendah. Selain itu, alasan lain yang bisa mendasari hal ini karena dimungkinkan pemilihan dan pengangkatan komisaris independen kurang efektif (FCGI, 2002). Hal ini merupakan isu atau hal yang penting, bahwa banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat menunjukkan independensinya atau sebenarnya tidak independen (*not truly independent*), sehingga fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik (Hasyim dan Devi, 2007). Dengan demikian, keberadaan atau proporsi dewan komisaris independen tidak dapat mempengaruhi pengambilan keputusan mengenai pengungkapan *environmental disclosure*.

Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Presiden Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Pada uji parsial (t-test) tabel 4.9 dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai β_4 sebesar 0,003 dengan

tingkat signifikan sebesar 0,927 berada lebih besar pada $\alpha = 0,05$, sehingga latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Haniffa dan Cooke (2005), Kusumastuti *et al* (2007), Permatasari (2009) serta Suhardjanto dan Miranti (2008) yang menyatakan bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*. Namun, hasil penelitian ini tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto dan Afni (2009), dan Choiriyah (2010) yang menemukan hasil bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris berpengaruh secara signifikan terhadap *environmental disclosure*.

Adapun alasan untuk menjelaskan hal ini bisa dilihat dari data statistik yang telah diproses dengan hasil prosentase 49% perusahaan sampel yang latar belakang pendidikan presiden komisarinya bisnis dan ekonomi. Sehingga jelas, kemampuan presiden dewan komisaris pun kurang maksimal dalam peranannya guna peningkatan *environmental disclosure*. Kelemahannya, cakupan yang digunakan dalam penelitian ini hanya mendefinisikan latar belakang pendidikan secara spesifik pada bisnis dan ekonomi (keuangan), padahal terdapat kemungkinan latar belakang pendidikan presiden komisaris sesuai dengan jenis usaha perusahaan yang dapat menunjang dan lebih diperlukan guna kelangsungan bisnis perusahaan. Selain itu, adanya kebutuhan akan *soft skill* dalam menjalankan bisnis, sedangkan pendidikan yang diperoleh di bangku sekolah merupakan pendidikan *hard skill*. Penelitian dari Harvard University di Amerika Serikat mengungkapkan, kesuksesan hanya

ditentukan sekitar 20% dengan hard skill dan sisanya 80% dengan soft skill (Nurudin, 2004).

Pengaruh Jumlah Rapat Dewan Komisaris terhadap *Environmental Disclosure*

Berdasarkan hasil pengujian parsial variabel jumlah rapat dewan komisaris (JRPTDK) terhadap *environmental disclosure*, dapat diketahui bahwa nilai β_5 sebesar 0,014 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 berada lebih kecil pada $\alpha = 0,05$, dengan demikian jumlah rapat dewan komisaris dapat dibuktikan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure*.

Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Brick dan Chidambaran (2007), Mizrawati (2009) dan Xie *et.al.* (2003) dalam Waryanto (2010) yang menyatakan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan pertemuan, maka akrual kelolaan perusahaan menjadi semakin kecil. Hal ini berarti semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan terhadap manajemen akan semakin efektif. Dan dengan begitu maka pengungkapan lingkungan juga akan menjadi semakin luas sebagai pertanggungjawaban terhadap dewan komisaris. Akan tetapi, hasil penelitian ini menentang hasil penelitian Suhardjanto dan Amelia (2011) yang menunjukkan hasil bahwa jumlah rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure*.

Alasan yang tepat untuk menjelaskan jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* karena rapat-rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris telah berjalan dengan efektif, dikarenakan seluruh anggota dewan komisaris lebih mementingkan

kepentingan perusahaan terkait dengan praktik pengelolaan lingkungan dibandingkan kepentingan pribadi atau kelompoknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil analisis data, uji asumsi klasik, pengujian hipotesis, serta interpretasi hasil, maka dapat ditarik kesimpulan dari penelitian ini, sebagai berikut:

1. Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* dengan tingkat signifikansi berada di bawah 0,05 yaitu $\alpha = 0,004$. Dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan maka akan mempengaruhi tingkat *environmental disclosure*. Hal ini karena semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula tanggungjawabnya terhadap lingkungan dan tingginya permintaan informasi dari masyarakat dan pemegang saham.
2. Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* dengan tingkat signifikansi berada di atas 0,05 yaitu $\alpha = 0,489$. Dapat disimpulkan bahwa besar kecilnya ukuran dewan komisaris tidak mempengaruhi pengungkapan *environmental disclosure*, karena dewan komisaris lebih fokus terhadap pengelolaan *financial* perusahaan dan tidak ada satupun dewan komisaris yang peduli terhadap pengelolaan lingkungan.
3. Proporsi dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* dengan tingkat signifikansi berada di atas 0,05 yaitu $\alpha = 0,818$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa

- banyak anggota dewan komisaris tidak memiliki kemampuan, dan tidak dapat menunjukkan independensinya atau sebenarnya tidak independen (*not truly independent*), sehingga fungsi pengawasan tidak dapat berjalan dengan baik.
4. Latar belakang pendidikan presiden komisaris tidak berpengaruh terhadap *environmental disclosure* dengan tingkat signifikansi berada di atas 0,05 yaitu $\alpha = 0,927$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa latar belakang pendidikan presiden komisaris sesuai dengan jenis usaha perusahaan lebih diperlukan dalam menunjang kelangsungan bisnis perusahaan.
 5. Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap *environmental disclosure* dengan tingkat signifikansi berada di bawah 0,05 yaitu $\alpha = 0,000$. Maka, dapat disimpulkan bahwa rapat dewan komisaris sudah berjalan efektif dimana tidak ada dominasi suara dari anggota dewan komisaris yang mementingkan kepentingan pribadi dan mengesampingkan kepentingan perusahaan.

Keterbatasan dan Saran Penelitian Selanjutnya

Dari hasil penyusunan penelitian ini, peneliti menyadari bahwa masih banyak keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Topik *environmental disclosure* yang masih jarang diteliti, menyebabkan peneliti merasa kesulitan dalam mengumpulkan referensi dan kajian teori yang mendalam;
2. Perusahaan tersebut masih belum menerapkan indeks yang sesuai dengan kriteria penelitian dalam pengungkapan *environmental*

disclosure, sehingga peneliti merasa kesulitan dalam menginterpretasikan laporan pengelolaan lingkungan yang dibuat oleh perusahaan;

3. Masih jarang perusahaan yang mengungkapkan kegiatan pengelolaan lingkungan dalam *annual report*, walaupun pemerintah telah menerbitkan UU No. 40 Tahun 2007, sehingga peneliti merasa kesulitan dalam menentukan sampel yang akan diteliti;
4. Perusahaan manufaktur dengan semua jenis skala produksi yang menjadi objek penelitian ternyata belum mampu mewakili pembuktian pengaruh dewan komisaris terhadap *environmental disclosure* (terbukti dari nilai data statistik yang diolah, masih ada yang belum sesuai dengan standar dan pedoman yang berlaku), sehingga peneliti mengharapkan pembagian jenis skala produksi perusahaan dan komparasi dengan jenis perusahaan yang lain misalnya perusahaan pertambangan sebagai objek penelitian mendatang.

Saran

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, dengan segala kerendahan hati peneliti bermaksud memberikan saran-saran yang dapat menjadi masukan bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi pihak regulator: diharapkan untuk lebih melakukan pengawasan terhadap perusahaan mengenai kewajiban mereka menerapkan UU No. 40 Tahun 2007, UU No. 25 Tahun 2007, UU No. 32 Tahun 2009 dan Pedoman KNKG (Komite Nasional Kebijakan Governance) Indonesia. Hal ini karena berdasarkan hasil penelitian pada prakteknya banyak perusahaan

yang belum mematuhi terkait standar dan pedoman yang telah ditetapkan. Sehingga tujuannya perusahaan akan semakin bertanggung jawab dalam kegiatan pengelolaan lingkungan, dan memberikan standar yang jelas dalam setiap indeks pengungkapan lingkungan yang dilaporkan tersebut.

2. Bagi Perusahaan: diharapkan untuk melakukan pengungkapan lingkungan yang lebih terperinci dengan penerapan indeks GRI dalam laporan pengelolaan lingkungannya, memperhatikan ukuran dewan komisaris perusahaan dengan ukuran diatas batas minimum sesuai UU No. 40 Tahun 2007. Sehingga akan memudahkan para pembaca laporan pengelolaan lingkungan terutama bagi mereka yang akan melakukan penelitian mengenai *environmental disclosure*.
3. Bagi penelitian selanjutnya: penelitian ini belum memberikan dasar yang kuat bagi teori agensi dan teori legitimasi sebagai dasar analisis yang menjelaskan *environmental disclosure*. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penjelasan mengenai pengungkapan kinerja lingkungan cenderung diterangkan oleh teori yang lain. Sehingga, analisis yang mengangkat ukuran perusahaan dan dewan komisaris sebagai variabel penjelas atas *environmental disclosure* seharusnya menyertakan variabel lain yang mampu menjembatani antara kerangka kerja teori agensi dan teori legitimasi dengan kerangka kerja teori yang menjelaskan teori secara langsung.

Daftar Pustaka

- Akhtarudin *et.al.* (2009). "Corporate Governance and Voluntary Disclosure in Corporate Annual Report of Malaysian Listed Firms". *JAMAR*. Vol.7, November.
- Almalia, dkk. (2007). "Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure Terhadap Economic Performance". *Proceeding The 1ST Accounting Conference*. Depok. Diakses 29 Oktober 2015.
- Anggraini, Fr.Reni Retno. (2006). "Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan (Studi Empiris pada Perusahaan-perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta)". Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Belkaoui, Ahmed and Philip G. Karpik. (1989). "Determinants of the Corporate Decision to Disclose Social Information". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 2 No.1 pp.36- 51.
- Bery, A. Michael dan Dennis, A. Rondinelli. (1998). "Proactive Corporate Environmental Management: A New Industrial Revolution". *Academy of Management Executive*. Vol.12 No.2 pp 38-50.
- Brick, Ivan E. dan Chidambaran, NK.(2007). "Board Meetings, Comitte Structure, and Firm Performance". http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?SSRN_id=1082414. Diakses 29 Oktober 2015.
- Brown, Noel dan Deegan, C. (1998). "The Public Disclosure of Environmental Performance

- Information (A dual Test of Media Agenda Setting Theory and Legitimacy Theory)". *Accounting and Business Research*. Vol. 29 No.1 pp 21-41.
- Buhr, Nola dan Freedman, Martin. (2001). "Culture, Institutional Factors and Differences in Environmental Disclosure Between Kanada and The United States". *Critical Perspectives on Accounting*. Vol. 12 pp.293-322.
- Cheng, *et.al.* (2006). "Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure". *International Journal of Accounting*. Vol.41 pp.262-289.
- Choiriyah, Umi. (2010). "Information Gap Pengungkapan Lingkungan Hidup di Indonesia". Skripsi Akuntansi Universitas Sebelas Maret. Diakses 27 Oktober 2015.
- Cohen *et.al.* (2009). "Corporate Reporting of Non-Financial Leading Indicators of Economic Performance and Sustainability". <http://www.ssrn.com>. Diakses 27 Oktober 2015.
- Cong, Yu and Freedman, M. (2011). "Corporate Governance and Environmental Performance and Disclosure". *Advances in Accounting, incorporating Advances in International Accounting Journal*. Vol.27 pp 223-232.
- Cooke, T.E. (1989). "Disclosure in the Corporate Annual Reports of Swedish Companies". *Accounting and Business Research*. Vol. 19 No.74 pp. 113-124.
- Corporate Governance Guidelines. (2007). Guidelines on Corporate Governance. Diakses 29 Oktober 2015.
- Daniri, Mas Ahmad. (2008). "Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan". Artikel Akuntansi. Diakses 29 Oktober 2015.
- Deegan, Craig dan Rankin. (1996). "Do Australian Companies Report Environmental News Objectively? An Analysis of Environmental Disclosure by Firms Prosecuted Successfully by the Environmental Protection Authority". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol.9 no.2 pp. 50-67.
- Deegan, Craig. (2002). "The Legitimising Effect of Social and Environmental Disclosure- A Theoretical Foundation". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol.15 No.3 pp.282-311.
- Deegan, Craig. (2004). "Environmental Disclosure and Share Price- A Discussion about Efforts to Study This Relationship". *Accounting Forum*. Vol.28 pp.122-136.
- Donaldson, T., dan Preston, L. (1995). "The Stakeholder Theory of The Corporations Concepts, evidence, and implications". *Academy of Management Review*. Vol. 20 No.1 pp. 65-92.
- Dowling *et.al.*(1975). "Organizational Legitimacy: Social Values and Organizational Behaviour". *The Pacific Sociological Review*. Vol.18 No.1 pp.122-136.
- Effendi, Muh. Arief. (2009). *The Power of Good Coporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fama, E.F., dan Jensen, M.C. (1983). "Separation of Ownership and Control. *Journal of Law and Economics*". Vol.26 no. 2 pp.301-325.
- Fatmawati, Faoziah Ulfah. (2011). "Pengaruh Praktik *Earning Management* Terhadap *Corporate Social Responsibility Disclosure*

- (CSRD) Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2010". Skripsi Akuntansi Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Diakses 27 Oktober 2015.
- Eng, L.L and Mak, Y.T. (2003). "Corporate Governance and Voluntary Disclosure". *Accounting and Public Policy*. Vol.22, pp 325-345.
- Fatayatiningrum, Desie. (2011). "Analisis Pengaruh Manajemen Laba dan Mekanisme *Corporate Governance* terhadap *Corporate Environmental Disclosure*" (Studi Empris pada Perusahaan yang Terdaftar di BEI Tahun 2008-2009). Skripsi Akuntansi Universitas Diponegoro. Diakses 29 Oktober 2015.
- Febrina dan Suaryana, Agung. (2011). "Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia". Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh.
- Freedman, M. dan Jaggi, B. (2005). "Global Warming, Commitment to the Kyoto Protocol, and Accounting Disclosures by The Largest Global Public Firms From Polluting Industries". *The International Journal of Accounting*. Vol. 40 pp.215- 232.
- Freeman dan Mc.Vea.(2001). "A Stakeholder Approach to Strategic Management". Working Paper No. 01-02. University of Virginia.
- Frendy dan Kusuma, Indra. (2011). "The Impact of Financial, non-Financial, and Corporate Governance Attributes on The Practice of Global Reporting Initiative (GRI) Based Environmental Disclosure". Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Aceh.
- Ghozali, Dodi. (2009). *Corporate Social Responsibility, From Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, Imam. (2009). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gray *et.al.* (1995). "Corporate Social and Environmental Reporting: A Review of The Literature and a Longitudinal Study of UK Disclosure". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 8 No.2 pp.47-77.
- Hackston dan Milne. (1996). "Some Determinants of Social and Environmental Disclosure in New Zealand Companies". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol. 1 pp.77-108.
- Haniffa dan Cooke. (2005). " The Impact of Culture and Governance on Coporate Social Reporting". *Journal of Accounting and Public Policy*, pp.391-430.
- Haniffa *et.al.* (2000). "Culture, Corporate Governance, and Disclosure in Malaysian Corporations". *Asian AAA World Conference in Singapore*. Diakses 29 Oktober 2015.
- Hashim, Hafiza Aishah dan Devi, S. Susela. (2007). "Corporate Governance, Ownership Structure And Earnings Quality: Malaysian Evidence".Universiti Malaysian. Diakses 27 Oktober 2015.
- Herawaty, Vinola. (2008). "Peran Praktek Coporate Governance Sebagai Moderating Variabel dari Pengaruh Earning Management terhadap Nilai Perusahaan".

- Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi XI, Pontianak*.
- Herwidayatmo. (2000). "Implementasi Good Corporate Governance untuk Perusahaan Publik di Indonesia". *Usahawan*. No. 10 Tahun XXIX.
- Hossain *et.al.* (2006). "Corporate Social and Environmental Disclosure in Developing Countries: Evidence From Bangladesh". Research Online *University of Wollongong*. Diakses 29 Oktober 2015.
- Ikhsan, Arfan. (2008). Akuntansi Lingkungan dan Pengungkapannya. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Isnanta, Rudi. (2008). "Pengaruh Corporate Governance dan Struktur Kepemilikan Terhadap Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan". Skripsi Akuntansi *Universitas Islam Indonesia*. Diakses 29 Oktober 2015.
- Jensen *et.al.* (1976). "Theory of The Firm: Managerial Behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure". *Journal of Financial Economics*. Vol.3 pp 305-360.
- John, K., dan L.W. Senbet.(1998). "Corporate Governance and Board Effectiveness". *Journal of Banking and Finance*. Vol.22 pp. 371-403.
- Kementrian Lingkungan Hidup (KLH). (2011). "Laporan Penilaian PROPER 2008- 2011". <http://www.menlh.go.id/> diakses 25 Oktober 2015.
- Klein, A. (2002). "Audit Committee, Board of Director Characteristics, and Earning Management". *Journal of Accounting and Economics*. Vol.33 pp.375- 400.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). (2006). Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia. Jakarta. Diakses 29 Oktober 2015.
- Kurniawati, Septiana. (2011). "Pengaruh Environmental Performance dan Environmental Disclosure terhadap Economic Performance". Skripsi Akuntansi *Universitas Diponegoro*. Diakses 25 Oktober 2015.
- Kusumastuti, Supatmi dan Satra. (2007). "Pengaruh Board Diversity terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif CG". *Journal Ekonomi Manajemen Universitas Kristen Petra Surabaya*. <http://www.petra.ac.id/>. diakses 29 Oktober 2015.
- Mizrawati, Alfathira. (2009). "Pengaruh Dewan Komisaris terhadap Transparansi Perusahaan (Tinjauan dari Agency Theory dan Stewardship Theory)". *Skripsi Tidak Dipublikasikan*. Universitas Diponegoro. Diakses 25 Oktober 2015
- Murhadi, Werner. (2009). "Good Corporate Governance and Earning management Practices : An Indonesian Cases". Available on-line at www.ssrn.com. Diakses 27 Oktober 2015
- Nurkhin, Ahmad. (2009). "Corporate Governance dan Profitabilitas: Pengaruhnya terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia)". Tesis Pasca Sarjana Program Studi Magister Akuntansi *Universitas Diponegoro*. www.eprints.undip.ac.id. Diakses Oktober 2015.
- Nurudin. (2004). Menggugat Pendidikan *Hard Skill*. <http://www.suaramerdeka.com/ha>

- <rian/0410/04/opi04.htm>. Diakses 27 Oktober 2015
- O'Donovan, Garry. (2002). "Environmental Disclosure in The Annual Report: Extending The Applicability and Predictive Power of Legitimacy Theory". *Accounting, Auditing, and Accountability Journal*. Vol.15 No.3 pp. 344-371.
- Pattern, D. (1992). "Intra- Industry Environmental Disclosure in Response to the Alaskan Oil Spill: A Note on Legitimacy Theory". *Accounting, Organizations and Society*. Vol. 17 No.5 pp 471-475.
- Permatasari, Novita Dian. (2009). "Pengaruh *Corporate Governance*, Etnis dan Latar Belakang Pendidikan Terhadap *Environmental Disclosure*" (Studi Empiris Pada Perusahaan *Listing* di Bursa Efek Indonesia). Skripsi Akuntansi Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Diakses 29 Oktober 2015.
- Pound, J. (1995). "The Promise of the Governed Corporation". *Harvard Business Review*. Vol. 73 no.2 pp.89-98.
- Rahayu, Sovi Ismawati. (2008). "Pengaruh Tingkat Ketaatan Pengungkapan Wajib dan Luas Pengungkapan Sukarela terhadap Kualitas Laba". Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi XI*, Pontianak.
- Richardson, Vernon. J. (1989). "Information Asymmetry An Earning Management: Some Evidence". Working Paper, 30 Maret. Diakses 29 Oktober 2015.
- Rosenstein, S., dan Wyatt. J.G.(1990). "Outside Directors, Board Independence and Shareholder Wealth". *Journal of Financial Economic*. Vol.26 pp.175-191.
- Sembiring, Eddy Rismanda. (2005). "Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggungjawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta". Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi VIII*, Solo.
- Simon, S.M.Ho, dan Wong. (2001). "A Study of Relationship Between Corporate Governance Structures and the Extent of Voluntary Disclosure". *Journal of International Accounting, Auditing, and Taxation*. Pp.139-156.
- Solomon. (2006). "Private Social, Ethical and Environmental Disclosure". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol.19. No.4 pp.564-591.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Suhardjanto, Djoko. (2008). "Environmental Reporting Practices: An Evidence from Indonesia". *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*. Vol. 8 No.1 pp.33-46.
- Suhardjanto, Djoko dan Yusnita, Theodora Cety (2010). "Pengaruh Corporate Governance terhadap Environmental Performance di Indonesia". *Akuntabilitas* Vol. 10 No.01 pp. 330-347 ISSN. 1412-0240.
- Suhardjanto, Djoko dan Dewi, Aryane. (2010). "Pengungkapan Risiko Financial dan Tata Kelola Perusahaan: Studi Empiris Perbankan di Indonesia". *Jurnal Keuangan dan Perbankan* Vol.15 No. 01 pp.105-118.
- Suhardjanto, Djoko dan Afni, Aulia. (2009). "Praktik Corporate Social Disclosure di Indonesia (Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia)". *Jurnal Akuntansi*. No. 03 Tahun XIII pp.243-364 ISSN 1410-3591.

- Suhardjanto, Djoko dan Miranti, Laras. (2008). "Indonesian Environmental Reporting Index dan Karakteristik Perusahaan". Makalah Akuntansi *Universitas Sebelas Maret*. Diakses 27 Oktober 2015.
- Sulastini, Sri. (2007). "Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Social Disclosure Perusahaan Manufaktur yang telah *Go Public*". Skripsi Akuntansi *Universitas Negeri Semarang*. Diakses 29 Oktober 2015.
- Sun, N., Salama, A., Hussainey, K., and Habbash, M. (2010). "Corporate Environmental Disclosure, Corporate Governance, and Earnings management". *Managerial Auditing Journal*. Vol.25 No.27 pp 679-700.
- Suratno *et.al.*(2006). "Pengaruh Environmental Performance terhadap Environmental Disclosure dan Economic Performance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta Periode 2001-2004)". Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Padang.
- Tilt, C.A.(1994). "The Influence of External Pressure Groups on Corporate Social Disclosure: Some Empirical Evidence". *Accounting, Auditing and Accountability Journal*. Vol.9 No.3 pp. 50-67.
- Ujiyantho, M.A, dan Pramuka, B.A. (2007). "Mekanisme *Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan*". Makalah Disampaikan Pada Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Diakses 20 Oktober 2015.
- Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Diakses 27 Oktober 2015.
- Utama, Sidaharta. (2007). "Evaluasi Infrastruktur Pendukung Pelaporan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan di Indonesia". Pidato Ilmiah Pengukuhan Guru Besar FEUI. Jakarta.
- Uwuigbe *et.al.* (2011). "The Effect of Board Size and Board Composition on Firms Corporate Environmental Disclosure: A Study of Selected Firms in Nigeria". *Acta Universitatis Danubius*. Vol.7 No.5 pp.164-176.
- Walden, W.D and Schwartz, B.N. (1997). "Environmental Disclosures and Public Policy Pressure". *Journal of Accounting and Public Policy*. Vol.16 pp.125-154.
- WALHI. (2005). "Kasus Pencemaran Lingkungan".<http://www.walhi.or.id/> diakses 29 Oktober 2015.
- Waryanto. (2010). "Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance (GCG) terhadap Luas Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia". Skripsi Akuntansi *Universitas Diponegoro*. Diakses 27 Oktober 2015.
- www.csrindonesia.com diakses 01 Oktober 2016.
- www.globalreporting.orgdiakses 01 Oktober 2016.
- www.idx.co.id diakses 27 Oktober 2016
- Yusnita, Theodora. (2010). "Corporate Governance, Environmental Performance dan Environmental Disclosure di Indonesia". Skripsi

- Akuntansi *Universitas Sebelas Maret*. Diakses 29 Oktober 2015.
- Zaenuddin, Ahmad. (2006). "Faktor-faktor yang Berpengaruh Terhadap Praktek Pengungkapan Sosial dan Lingkungan Pada Perusahaan Manufaktur Go Publik". Tesis Akuntansi *Universitas Diponegoro*. Diakses 28 Oktober 2015.
- Zuhroh, D., dan Sukmawati. (2003). "Analisis Pengaruh Luas Pengungkapan Sosial dalam Laporan Tahunan Perusahaan terhadap Reaksi Investor (Studi Kasus pada Perusahaan-perusahaan high profile di BEJ)". Makalah disampaikan pada *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Surabaya.